

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Permasalahan kekerasan seksual pada anak tidak hanya berkaitan dengan tingginya risiko tindakan kekerasan, tetapi juga berhubungan dengan rendahnya kemampuan anak dalam mengomunikasikan batasan diri secara asertif. Dalam situasi rawan, anak tidak selalu mampu memberikan penolakan secara tegas karena relasi antara korban dan pelaku sering kali diwarnai ketimpangan kuasa, kedekatan personal, ancaman, bujukan, atau penyalahgunaan otoritas oleh figur yang dipercaya, seperti anggota keluarga, pendidik, maupun tokoh masyarakat (Santi, 2024). Kondisi tersebut dapat membuat korban berada dalam tekanan psikologis, merasa takut, dan kesulitan merespons secara aktif. Bahkan, dalam situasi ancaman seksual, sebagian korban dapat mengalami respons diam atau membeku yang dikenal sebagai *tonic immobility*, yaitu respons trauma defensif ketika individu merasa tidak memiliki kendali atau jalan keluar dari situasi yang mengancam (de Heer & Jones, 2024). Situasi tersebut menunjukkan bahwa diamnya korban tidak dapat dimaknai sebagai bentuk persetujuan, melainkan dapat terjadi karena tekanan psikologis dan keterbatasan respons saat menghadapi ancaman.

Kekerasan seksual merupakan bagian dari kekerasan terhadap anak yang membutuhkan perhatian serius. Kekerasan terhadap anak, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, merupakan setiap perbuatan yang dilakukan terhadap anak yang dapat menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual, termasuk tindakan penelantaran serta eksploitasi anak untuk tujuan komersial. Tindakan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, kehormatan, serta perkembangan anak. Sementara itu, pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5) adalah

setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

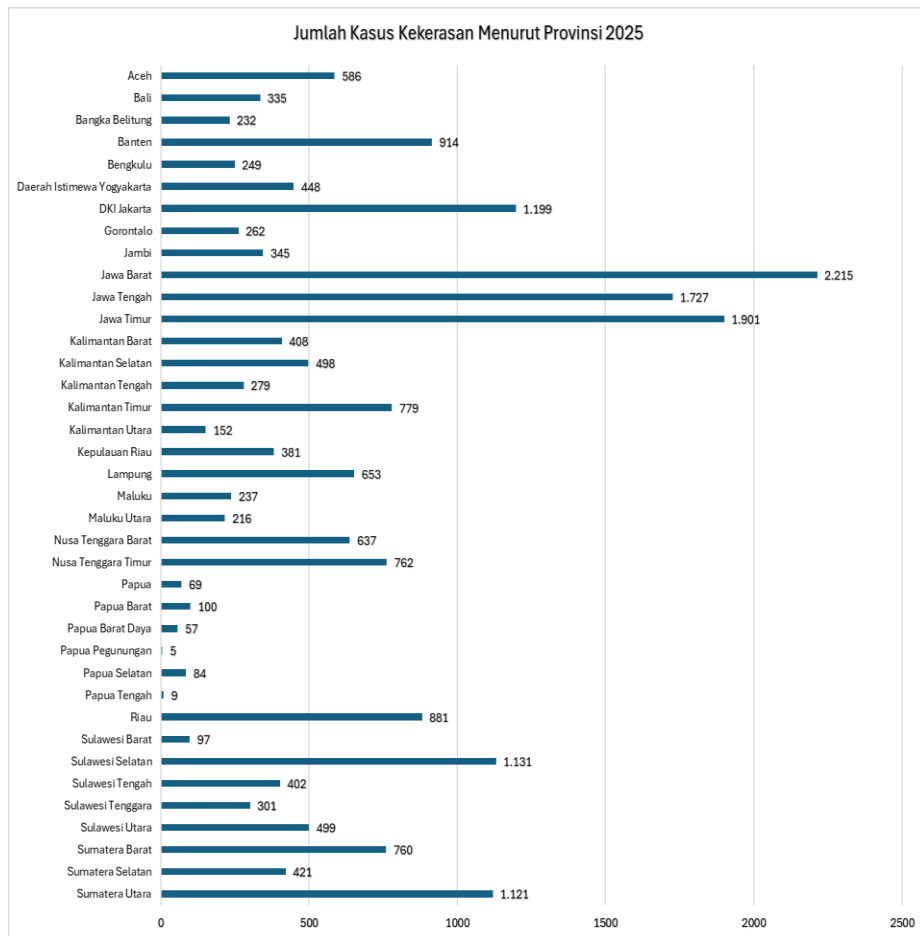
Data yang masuk dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat pelaporan kasus kekerasan pada anak di Indonesia periode tahun 2021-2025 sebagai berikut:



Gambar 1.1 Data Kekerasan pada Anak di Indonesia Rentang Tahun  
2021- 2025

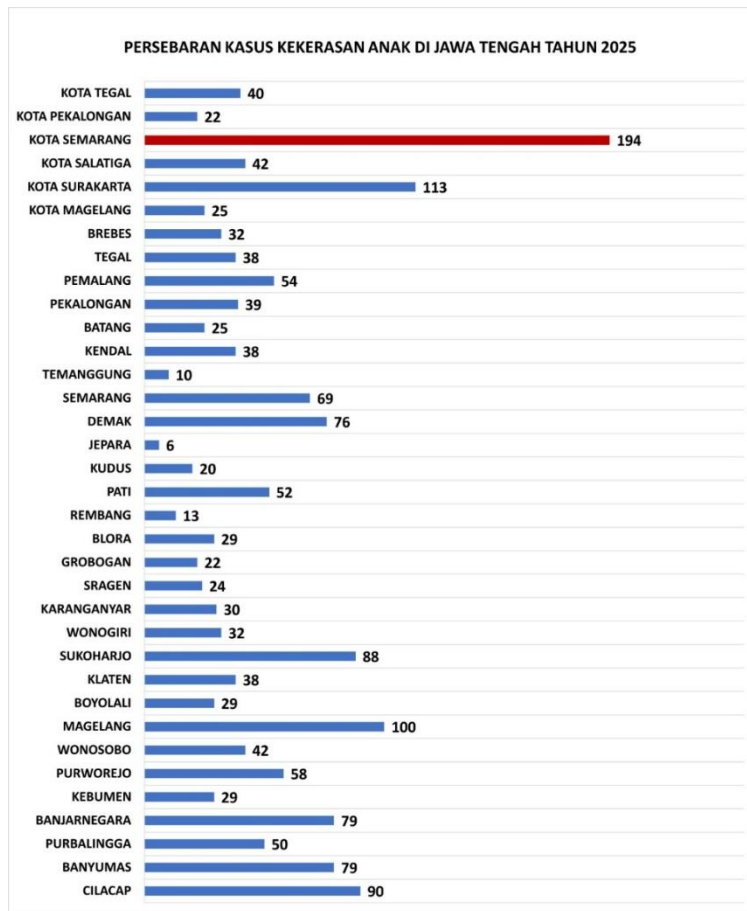
(Sumber: SIMFONI PPA)

Diagram tersebut menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021-2025 tren kasus kekerasan pada anak di Indonesia mengalami peningkatan dengan rincian jumlah kasus pada tahun 2021 sebanyak 14.446, tahun 2022 sebanyak 16.106 kasus, tahun 2023 sebanyak 18.175 kasus, tahun 2024 sebanyak 19.628 kasus, dan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 21.352 kasus. Peningkatan nasional ini juga juga tercermin pada distribusi kasus di tingkat provinsi. Terdapat 3 provinsi yang menunjukkan angka tinggi kekerasan pada anak, provinsi dengan posisi pertama adalah Jawa Barat, kedua adalah Jawa Timur, dan disusul oleh Jawa Tengah pada posisi ketiga dengan jumlah kasus sebanyak 1.727 dengan spesifikasi korban 636 anak laki-laki dan 1.263 korban anak perempuan.



Gambar 1.2 Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Indonesia Berdasarkan Provinsi Sepanjang Tahun 2025  
(Sumber: SIMFONI PPA)

Keseluruhan data kasus kekerasan pada anak yang tercatat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang menunjukkan angka terbanyak dengan total 194 kasus pada tahun 2025. Kota Semarang sebagai ibu Kota Provinsi Jawa Tengah merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan dengan tingkat urbanisasi yang tinggi. Hal ini turut membawa konsekuensi pada kompleksitas permasalahan sosial, termasuk meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak.



Gambar 1.3 Jumlah Persebaran Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Jawa Tengah

(Sumber: SIMFONI PPA)

Rekapitulasi data penanganan kasus UPTD PPA Kota Semarang periode 1 Januari 2025 - 24 Februari 2026 menunjukkan data korban kasus kekerasan pada anak sebagai berikut:

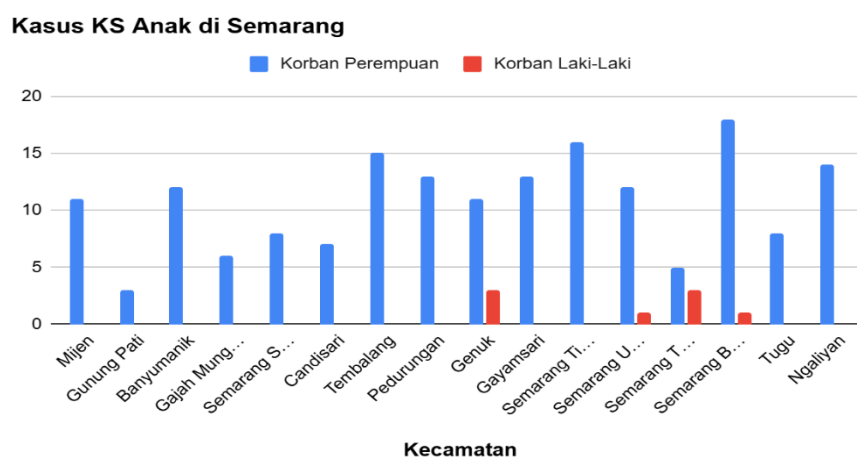
Tabel 1.1 Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Semarang periode 1 Januari 2025 - 24 Februari 2026

<b>Tempat Kejadian</b>	Rumah Tangga	88
	Tempat Kerja	0
	Sekolah	18
	Fasilitas Umum	51
	Lainnya	74

<b>Jumlah Kasus Berdasarkan Tindakan Kekerasan yang dialami Korban</b>	Fisik	48
	Psikis	27
	Seksual	153
	Penelantaran	2
	Eksplorasi Ekonomi	0
	Kekerasan Lainnya	1
	Trafficking	0
<b>Jenis Kelamin</b>	Laki-laki	47
	Perempuan	184
<b>Pendidikan</b>	Tidak Sekolah	26
	SD	69
	SMP	94
	SMA	41
<b>Kelompok Usia</b>	0-5 tahun	25
	6-12 tahun	59
	13-17 tahun	147
<b>TOTAL</b>		<b>231</b>

(Sumber: UPTD PPA Kota Semarang)

Data penanganan kasus tersebut menunjukkan bahwa dari total 231 korban kekerasan terhadap anak, jenis tindakan kekerasan yang dialami korban paling banyak adalah jenis kekerasan seksual dengan persebaran wilayah kecamatan di Kota Semarang sebagai berikut:



Gambar 1.4 Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak per-Kecamatan di Kota Semarang periode 1 Januari 2025 - 24 Februari 2026

(Sumber: UPTD PPA Kota Semarang)

Diagram tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai kecamatan dengan urgensi tinggi terkait kekerasan seksual pada anak. Kecamatan Semarang Barat menjadi salah satu wilayah di Kota Semarang dengan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tertinggi dibandingkan kecamatan lain sebanyak 19 kasus. Hal ini berkaitan erat dengan karakteristik wilayah yang memiliki populasi besar. Berdasarkan data terkini, jumlah penduduk di kecamatan ini pada periode 2025–2026 diperkirakan mencapai 149.357 jiwa, dengan kepadatan sekitar 6.889,16 jiwa per kilometer persegi. Tingginya kepadatan penduduk membuat interaksi sosial antarwarga berlangsung lebih intensif dalam keseharian.

Semarang Barat juga merupakan kawasan dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tinggi, ditandai dengan adanya permukiman padat, pusat perdagangan, serta berbagai pusat kegiatan warga. Kondisi perkotaan yang padat dan dinamis ini turut meningkatkan risiko munculnya beragam permasalahan sosial yang melibatkan anak, seperti kekerasan seksual. Oleh karena itu, wilayah ini membutuhkan perhatian khusus dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak.

Tabel 1.1, menurut kelompok usia, mayoritas korban berada pada rentang usia 13–17 tahun dan berlatar belakang pendidikan SMP. Data ini menunjukkan bahwa remaja usia 13–17 tahun dengan latar pendidikan SMP merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan. Hasil wawancara pada tanggal 5 Maret 2026 dengan Safira Adjani, S.H. selaku analis hukum UPTD PPA DP3A Kota Semarang menyebutkan bahwa kelompok usia 13-17 tahun tidak hanya menempati posisi tertinggi dalam angka kekerasan secara umum, tetapi juga mendominasi angka kekerasan seksual.

Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan anak melalui konstitusi. Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Ketentuan ini kemudian

diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur secara lebih rinci mengenai perlindungan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang merupakan instansi Pemerintah Kota Semarang yang bertanggung jawab menjalankan tugas dan kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Mengacu pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP3A memiliki tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 disebutkan bahwa peningkatan kualitas hidup keluarga dalam pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak menjadi salah satu isu strategis pembangunan daerah.

Upaya perlindungan anak DP3A diwujudkan dalam bentuk komitmen untuk mengatasi berbagai permasalahan tindak kekerasan, termasuk tindak kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang. Berbagai upaya tersebut mencakup upaya preventif, kuratif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Program preventif DP3A bertujuan untuk mengupayakan pencegahan kenaikan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak melalui kegiatan sosialisasi edukasi, seperti edukasi di sekolah, kampanye publik hingga penyuluhan terhadap masyarakat. Program ini mencakup indikator kinerja, tujuan, sasaran, program (hasil yang diharapkan), serta kegiatan dan subkegiatan (output), dengan salah satu ukurannya adalah persentase anak korban kekerasan yang berhasil ditangani. Berbagai program yang telah dijalankan antara lain

Tabel 1.2 Daftar Program Sosialisasi DP3A Sepanjang Tahun 2025-2026

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat/Lokasi	Tema	Sasaran
1	10 Maret 2026	Kantor Kelurahan Brumbungan, Semarang Tengah	Sosialisasi Parenting Edukasi	Orang Tua
2	Selasa, 25 November 2025	Aula SMPN 11 Semarang	Eksplorasi Anak di Digital	Siswa SMP
3	Rabu, 26 November 2025	Aula SMPN 22	Eksplorasi Anak di Digital	Siswa SMP
4	Senin, 17 November 2025	Balai Kelurahan Mangkang Kulon - SMPN 28 Semarang	Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Digital	Siswa SMP
5	19 November 2025	Pendopo Dinas Pengendalian Penduduk dan Bencana	Stop Bullying - Start Caring	Siswa SMP dan SMA
6	Selasa, 12 November 2025	SMPN 25 Semarang	Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Digital	Siswa SMP
7	Senin, 10 November 2025	Ruang Pertemuan Zoom Dinas Pendidikan Kota Semarang	Sosialisasi Parenting Gerakan Bagi Ayah	Orang tua/Ayah
8	23 April 2025	SMAN 1 Semarang	Jejak Puspaga Semarang (Jelajah Edukasi dan Jalani Aksi) Sadari dan Bertumbuh: Gali Potensi Diri dan Rancang Masa Depan	Siswa SMA
9	Selasa, 18 Februari 2025	Hotel Front One HK Resort	Peningkatan Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Guru TPQ

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat/Lokasi	Tema	Sasaran	
10	Sabtu, 22 Februari 2025	Aula Semar	Puspaga	Bangun Keluarga Super, Saatnya Pahami Peran Orang Tua!	Orang Tua dan Calon Orang Tua
11	Minggu, 23 Februari 2025	Aula Semar	Puspaga	Taktik Magic Konflik, Keluarga Asik	Cegah Ciptakan Pelajar SMA & Mahasiswa
12	Selasa, 11 Maret 2025	Gedung Juang 45 Semarang	Sosialisasi Kota	Perda Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Lurah se-Kota Semarang, FKKG, PUSPA, dan Organisasi Berbasis Perempuan
13	13 Maret 2025	Kelurahan Mangkang Kulon	Kursus Pasangan	Singkat Usia Subur	Pasangan Usia Subur
14	26 April 2025	SMAN 1 Semarang	JEJAK SEMAR	PUSPAGA	Siswa SMA
15	25 Mei 2025	Balai Kelurahan Rowosari, Tembalang	PUSPAGA SEMAR	Hadir dalam Mendukung Kota Inklusi	Anak Komunitas Difabel Ar Rizki
16	27 Mei 2025	Balai Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunung Pati	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Terhadap dan Anak	Warga Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunung Pati

Sumber: Instagram @dp3a\_kotasemarang

Daftar program sosialisasi DP3A tahun 2025–2026, menunjukkan bahwa beberapa kegiatan pencegahan memang telah dilaksanakan di SMP, seperti di SMPN 11 Semarang, SMPN 22 Semarang, SMPN 25 Semarang, dan SMPN 28 Semarang. Namun, tema kegiatan yang dominan berfokus pada eksploitasi seksual anak di media digital. Sementara itu, bentuk

kekerasan seksual yang dialami anak tidak dapat dipersempit hanya pada konteks media sosial, melainkan juga berkaitan dengan situasi langsung di kehidupan nyata. Sesuai dengan pernyataan (Ståhl & Dennhag, 2021) bahwa pelecehan seksual dapat terjadi secara *offline* maupun *online*, penelitiannya menunjukkan bahwa pelecehan seksual *offline* menjadi bentuk yang paling sering dilaporkan oleh remaja. Oleh karena itu, kebutuhan yang perlu dijawab tidak hanya berkaitan dengan edukasi mengenai risiko kekerasan seksual di media digital, tetapi juga penguatan kemampuan remaja dalam menghadapi situasi rawan pada interaksi sosial secara langsung.

Kelompok siswa SMP menjadi salah satu sasaran penting dalam program DP3A karena berada pada tahap remaja awal. Pada tahap ini anak mengalami masa pubertas yang melibatkan perkembangan fisik, sosial, emosional, dan kognitif yang berlangsung secara signifikan dalam waktu relatif singkat (Vankerkhoven et al, 2023). Pada tahap remaja awal ini, proses transisi dari anak menuju dewasa disertai perubahan yang menonjol pada aspek seksualitas, termasuk munculnya dorongan seksual dan ketertarikan terhadap lawan jenis (Mutia et al., 2025). Remaja awal adalah anak dengan rentang usia 12-15 tahun (Hurlock, 2011).

Kematangan emosi dan kemampuan regulasi diri pada remaja awal belum berkembang secara optimal karena mereka masih berada pada tahap pencarian identitas. Dinamika perkembangan yang berlangsung cepat dengan kondisi emosional yang belum matang tersebut, ditambah dorongan untuk menjalin relasi dengan lawan jenis, menjadikan remaja awal rentan mengalami kekerasan seksual. Bentuk kekerasan yang dapat dialami meliputi hubungan seksual yang tidak diinginkan, pelecehan seksual, *stalking* yang melanggar batasan pribadi, hingga kekerasan dalam pacaran secara fisik maupun psikologis.

Kekerasan seksual pada remaja awal menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan psikologis dan fisik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban dapat mengalami trauma, kecemasan tinggi,

perasaan tertekan, gangguan makan, gangguan psikosomatik, serta kesulitan membangun relasi dengan lawan jenis (Anindya dkk., 2020; Azzopardi dkk., 2019; Nur Khaliza dkk., 2021). Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian longitudinal berbasis *Millennium Cohort Study* di Inggris menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan seksual pada masa remaja berkaitan dengan peningkatan masalah kesehatan mental, termasuk *psychological distress*, *self-harm*, dan *attempted suicide*, dengan risiko yang lebih tinggi dibandingkan remaja yang tidak mengalami kekerasan seksual (Bentivegna et al., 2022). Oleh karena itu, sebagai langkah preventif, dibutuhkan peran DP3A dalam menempatkan anak SMP pada posisi yang membutuhkan arahan serta penguatan keterampilan proteksi diri.

Besarnya dampak kekerasan seksual pada remaja menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak dapat hanya berfokus pada pemberian informasi secara teoritis, tetapi juga perlu diarahkan pada penguatan keterampilan remaja dalam menghadapi situasi berisiko secara nyata. Dalam konteks ini, metode edukasi yang digunakan menjadi aspek penting karena menentukan sejauh mana siswa mampu memahami, merespons, dan menerapkan langkah perlindungan diri dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2026 dengan Arini selaku Seksi PPK Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Kantor DP3A Semarang, menyatakan bahwa sosialisasi yang selama ini berjalan masih menggunakan metode ceramah yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Metode tersebut menempatkan siswa lebih banyak sebagai pendengar pasif dan belum memberi ruang yang cukup bagi mereka untuk berlatih menghadapi situasi konkret yang berpotensi mengarah pada kekerasan seksual. Padahal, dalam konteks pencegahan kekerasan seksual, remaja tidak hanya membutuhkan pemahaman, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan ketika menghadapi situasi berisiko secara langsung.

Metode simulasi *roleplay* menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Metode ini memungkinkan siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mempraktikkan secara

langsung bagaimana merespons situasi yang menyerupai kondisi nyata. Penggunaan metode simulasi *roleplay* dalam penelitian ini dikembangkan dalam tiga tahapan, yaitu *roleplay* awal untuk mengidentifikasi respons awal siswa, refleksi dan penguatan materi, serta *roleplay* akhir sebagai bentuk latihan ulang keterampilan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *experiential learning* yang menekankan proses pengalaman, refleksi, dan praktik ulang dalam pembentukan keterampilan (Kolb, 1984). Penelitian oleh A. Octamaya Tenri Awaru, Najamuddin, Rahmi Juwita, M. Watif Massaunna, dan Muhammad Nur (2025) juga menunjukkan bahwa metode partisipatif seperti simulasi *roleplay* efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan protektif siswa dalam menghadapi situasi berisiko.

Pelaksanaan simulasi *roleplay* dalam kegiatan ini membutuhkan media yang dapat membantu siswa memahami skenario, peran, serta situasi sosial yang harus diperankan secara lebih konkret berupa *role card*. Media ini juga membantu siswa berlatih dalam situasi sosial yang aman dan simulatif, sehingga mereka dapat mengembangkan keberanian dalam menyampaikan respons, mengelola emosi, serta mengekspresikan diri secara verbal maupun non-verbal secara lebih tepat. Dalam konteks pembelajaran partisipatif, penggunaan *role card* memberikan ruang praktik yang lebih terarah karena siswa berfokus pada satu skenario sosial dalam satu waktu. Dengan demikian, *role card* tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu visual, tetapi juga sebagai media latihan yang mendukung keterlibatan aktif siswa selama proses simulasi berlangsung (Dianggi et al., 2025).

Simulasi *roleplay* berbasis media *role card* melatih siswa untuk merespons situasi sosial berisiko kekerasan seksual melalui pembekalan *Personal Safety Skills 3R*, yaitu *Recognize*, *Resist*, dan *Report* (Piara et al., 2025). Pembekalan ini penting agar siswa memahami langkah perlindungan diri yang dapat dilakukan ketika menghadapi situasi tidak aman. *Recognize*, yakni kemampuan anak mengenali ciri-ciri orang yang berpotensi melakukan kekerasan seksual dan mengenali bagian-bagian tubuh yang

boleh dan tidak boleh disentuh orang lain. *Resist*, yakni kemampuan anak bertahan dari perlakuan atau tindakan kekerasan seksual. *Report*, yakni kemampuan anak melaporkan perilaku kurang menyenangkan secara seksual yang diterimanya dari orang dewasa dan bersikap terbuka kepada orang tua agar orang tua nya dapat memantau kondisi anak tersebut.

Proses pembekalan 3R tersebut berkaitan erat dengan keterampilan komunikasi asertif, yaitu kemampuan individu untuk menyampaikan pikiran, perasaan, kebutuhan, dan batasan diri secara jelas, tegas, serta tetap menghargai orang lain. (Nuramaliyah & Ilham, 2026). Keterampilan komunikasi asertif berperan sebagai penunjang langkah *Resist* terhadap perilaku seksual berisiko, termasuk paparan pornografi dan kekerasan seksual pada remaja. Remaja yang memiliki kemampuan asertif cenderung lebih memahami hak personalnya untuk mengekspresikan perasaan dan pendapat secara positif, sehingga tekanan sosial yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan menjadi berkurang (Ibnu et al., 2020).

Kemampuan komunikasi asertif juga membantu remaja memiliki keberanian untuk berkata “tidak”, menolak perlakuan yang melanggar batas pribadi, serta menyampaikan ketidaknyamanan ketika menghadapi situasi yang membuat mereka merasa terancam atau tidak aman. Lebih lanjut, pelatihan komunikasi asertif terbukti memberikan dampak protektif, khususnya dalam mengurangi potensi terjadinya pemaksaan dalam relasi berpacaran pada remaja awal. (Ramadhan et al., 2026)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa tingginya kasus kekerasan seksual pada remaja usia SMP menunjukkan masih perlunya penguatan upaya pencegahan yang tidak hanya berfokus pada pemberian informasi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan anak dalam menghadapi situasi rawan kekerasan seksual secara langsung. Edukasi preventif yang selama ini dilakukan masih cenderung bersifat satu arah dan lebih banyak berfokus pada pembahasan eksploitasi serta kekerasan seksual di

media sosial atau ruang digital. Padahal, remaja juga dihadapkan pada berbagai situasi rawan dalam interaksi langsung di kehidupan sehari-hari yang membutuhkan kemampuan merespons secara tepat. Keterampilan komunikasi asertif sebagai bagian dari *personal safety skills* menjadi penting agar remaja mampu mengenali batasan diri, menolak tindakan yang tidak nyaman, serta melindungi diri dari potensi kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan metode edukasi yang lebih interaktif, partisipatif, dan kontekstual. Salah satu solusi yang dinilai relevan adalah penggunaan metode simulasi *roleplay* berbasis media *role card* untuk meningkatkan keterampilan komunikasi asertif remaja dalam pencegahan kekerasan seksual.

### **1.3 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah meningkatkan keterampilan komunikasi asertif sehingga anak lebih siap dalam menghadapi berbagai situasi sosial berisiko yang mengarah ke kekerasan seksual melalui sebuah event edukasi yang berfokus pada penggunaan metode simulasi *roleplay* sebagai pendekatan pembelajaran interaktif dan partisipatif berbasis media *role card*. Event ini merupakan salah satu upaya preventif dalam pencegahan kekerasan seksual pada remaja di SMP Negeri 30 Kota Semarang.

### **1.4 Manfaat**

#### **A. Manfaat Teoritis**

1. Kegiatan edukasi ini dapat menjadi kajian dan pengembangan ilmiah dalam bidang komunikasi, khususnya pada aspek komunikasi asertif dalam pencegahan kekerasan seksual.
2. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam pengembangan metode pembelajaran interaktif berbasis simulasi *roleplay* yang tidak hanya berfokus pada pemahaman, tetapi juga pada pembentukan keterampilan komunikasi asertif remaja dalam situasi sosial yang berisiko.
3. Kegiatan ini dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas komunikasi asertif, pencegahan kekerasan seksual,

maupun penggunaan simulasi *roleplay* berbasis *role card* dalam pembekalan keterampilan perlindungan diri remaja.

## **B. Manfaat Praktis**

### 1. Bagi Mahasiswa

- a. Keterlibatan langsung mahasiswa dalam kegiatan ini memberikan pengalaman praktis dalam merancang strategi komunikasi, memahami kebutuhan audiens remaja, serta mengembangkan pendekatan komunikasi yang lebih aplikatif.
- b. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola kegiatan edukasi, mulai dari penyusunan metode, penggunaan media, pelaksanaan simulasi, hingga evaluasi respons peserta.
- c. Mahasiswa memperoleh pengalaman dalam menerapkan teori komunikasi secara langsung, khususnya komunikasi komunikasi asertif dalam konteks pencegahan kekerasan seksual pada remaja.

### 2. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

- a. Kegiatan edukatif ini memberikan alternatif metode sosialisasi yang lebih interaktif dan partisipatif bagi DP3A Kota Semarang dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja, khususnya melalui pendekatan simulasi *roleplay*
- b. Kegiatan ini memberikan wawasan praktis mengenai metode edukasi berbasis simulasi yang dapat digunakan untuk melatih kemampuan remaja dalam mengomunikasikan penolakan secara tegas dan merespons situasi rawan secara tepat.
- c. Hasil evaluasi dari kegiatan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DP3A dalam mengembangkan program edukasi yang lebih efektif, serta membuka peluang kerja sama dengan institusi pendidikan dan pihak lain dalam memperluas dampak program preventif.

### 3. Bagi Siswa SMP

- a. Melalui kegiatan edukatif ini, remaja memperoleh keterampilan komunikasi asertif sebagai upaya melindungi diri dari kekerasan seksual.
- b. Melalui metode edukasi berbasis simulasi *roleplay*, remaja didorong untuk lebih aktif dalam melatih kemampuan komunikasi, menyampaikan penolakan, serta menunjukkan respons yang tepat dalam situasi yang berpotensi berisiko.
- c. Kegiatan ini dapat mendorong terbentuknya lingkungan sosial yang lebih aman dan suportif, dimana remaja memiliki keberanian serta lebih peka terhadap potensi pelanggaran yang terjadi di sekitarnya.

### 1.5 Luaran

Luaran dari *project* tugas akhir ini adalah event edukatif yang menggunakan metode simulasi *roleplay* berbasis media *role card* dengan nama event “**BESTARI: Bersama Kenali Batasan Diri dan Lindungi Diri!**” *Project* tugas akhir ini juga dilengkapi dengan modul kegiatan.